

# POTENSI KERETAKAN HUBUNGAN SOSIAL MUSLIM-BUDDHIS

(Kasus Konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai Sumatera Utara)

*The Potential Clash of Social Relationship between Muslim and Buddhist  
(Case Study on the Conflict of Buddha Statue in Tanjungbalai City, North Sumatra)*

IRWANSYAH

IRWANSYAH

IAIN Sumatera Utara  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan  
Estate  
Telp. Telp./Fax. 061-66115683  
e-mail: irw.betawi@yahoo.co.id  
Naskah diterima: 12 Mei 2013  
Naskah direvisi : 29 Juli-19 Agustus  
2013  
Naskah disetujui: 17 September  
2013

## **ABSTRACT**

*Socio-religious conflicts that occurred in Tanjungbalai City allegedly caused by the establishment of Buddha Statue. This research aims to reveal how relations between Muslim and Buddhist in Tanjungbalai. This study classified as qualitative research. Fact were obtained through observation, interviews, and document review. The results showed social conflict occurred after the establishment of Buddha Statue. Tanjungbalai as one of "China town", to trigger the social jealousy. In addition to the economic factors are controlled by China, Tanjungbalai City the majority of Muslims, did not accept the establishment of 6 metre tall Buddha Statue that was on the fourth floor of the building Vihara Tri Ratna. Muslims aliancy movement asking for removal of the statue. Buddhists being defensive and worried that the Malays (Muslims) think that the Buddhist same with "the Chinese".*

**Keywords:** Buddha Statue, Tanjungbalai, Muslim, Buddhist, Cina

## **ABSTRAK**

*Konflik sosial keagamaan yang terjadi di Kota Tanjungbalai ditengarai disebabkan oleh pendirian Patung Buddha. Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana hubungan masyarakat muslim dan umat Buddha di Tanjungbalai. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan konflik sosial terjadi setelah adanya pendirian Patung Buddha. Tanjungbalai sebagai salah satu "kota Cina", menjadi pemicu adanya kecemburuan sosial. Selain karena faktor ekonomi yang dikuasai Cina, kota Tanjungbalai yang mayoritas pemeluk agama Islam, tidak menerima adanya pendirian Patung Buddha setinggi 6 meter yang berada di atas gedung lantai empat Vihara Tri Ratna. Gerakan aliansi umat Islam menginginkan penurunan patung tersebut. Umat Buddha bersikap defensif serta khawatir kalau masyarakat Melayu (Muslim) memandang bahwa Buddhis sama dengan "orang Cina".*

**Kata kunci:** Patung Buddha, Tanjungbalai, Muslim, Buddhis, Cina

## PENDAHULUAN

Menurut Hans Kung (1991), dalam sebuah penegasannya yang cukup masyhur mengungkapkan "tidak mungkin ada kedamaian di dunia tanpa kedamaian agama-agama". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa agama menjadi faktor yang paling dominan mengakibatkan ketidakrukunan. Terlepas apakah asumsi ini dapat dibenarkan karena dalam kenyataannya banyak pendapat lain menyebutkan bahwa agama hanyalah salah satu *icon* untuk melegitimasi konflik, tidak sedikit teori-teori sosiologi agama yang membenarkan anggapan bahwa agama menjadi salah satu penyebab konflik (ketidakrukunan). Afif Muhammad (1997: 1) misalnya, menyebutkan dua pendekatan terhadap pemahaman tentang agama yang kemudian dapat menjadi berbagai macam benturan yang berpotensi konflik, yaitu: *pertama*, agama sebagai doktrin dan ajaran; dan *kedua*, aktualisasi doktrin tersebut yang dapat ditemukan dalam sejarah. Kedua hal itu disebut Afif Muhammad sebagai "wajah ganda" dari "agama". Setelah membandingkan istilah "wajah ganda"-nya Afif dengan "doktrin dan peradaban" Nurholish Madjid; "Islam ideal dan Islam realitas"-nya Nasr, juga kasus Perang Salib antara Islam dan Kristen, Dadang Kahmad (2006: 150) menambahkan bahwa agama di satu sisi dapat dilihat sebagai faktor pemersatu (*integrative factor*), namun di sisi lain juga merupakan faktor disintegratif (*disintegrative factor*). Faktor yang terakhir muncul karena agama itu sendiri dapat dipahami memiliki potensi yang melahirkan intoleransi (konflik), baik karena faktor internal ajaran agama maupun karena faktor eksternal.

Sungguhpun Pancasila merupakan ideologi dasar yang dianggap menjadi jalan tengah bagi penyelesaian konflik sosial bernuansa agama, bukan berarti riak-riak konflik tersebut tidak terjadi di Indonesia. Bahkan lebih tajam dari itu, konflik tersebut telah menjadi catatan sejarah kelam bagi Indonesia yang melibatkan masyarakat akar rumput (*grass root*) hingga memakan waktu yang cukup panjang. Tomagola (2003)

menyebutkan konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Kalimantan Selatan, patut dicatat sebagai konflik sosial bernuansa agama yang cukup besar sepanjang sejarah bangsa Indonesia.

Namun demikian, dalam kasus ketidakrukunan yang dikaitkan dengan Muslim, kasus ketidakrukunan sering melibatkan pemeluk Muslim dan Kristen dibanding agama lainnya, seperti Muslim dengan Hindu, Muslim dengan Buddha, atau Muslim dengan Khonghucu (Irwansyah: 2004). Pada penelitian ini, kasus yang berpotensi melahirkan ketidakrukunan justru melibatkan umat Islam dan Buddha di Kota Madya Tanjungbalai. Kasus tersebut kemudian dikenal dengan kasus Patung Buddha Tanjungbalai.

Memang, sejauh ini Sumatera Utara dianggap sebagai daerah yang cukup kondusif dalam hal kerukunan umat beragama. Namun demikian, tetap saja potensi konflik banyak ditemukan di dalamnya. Berdasarkan hasil dialog pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama, beberapa potensi konflik yang ditemukan di Sumatera Utara, adalah: (1) kesenjangan kesejahteraan sosial penduduk; (2) adakalanya terjadi intervensi terhadap tradisi dan keyakinan keagamaan yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan sekalipun belum sempat berkembang; (3) kekerasan sosial akibat dari kesenjangan sosial maupun sikap budaya; (4) penggunaan idiom atau simbol-simbol secara tidak tepat yang telah menjadi identitas kelompok agama tertentu. Sementara itu, potensi kerukunan yang ditemukan di Sumatera Utara, adalah: (1) terbentuknya forum bersama antarumat beragama yang cukup efektif; (2) berfungsinya medium adat dan marga sebagai wadah yang berfungsi mengefektifkan komunikasi dan mempererat hubungan emosional serta tradisi antarumat berbeda agama; (3) keterlibatan pemuda dan tokoh agama dalam kamtibmas; (4) pencerahan pemahaman masyarakat melalui penerbitan bernuansa akademik; (5) tingkat rata-rata pendidikan penduduk yang relatif tinggi turut mempengaruhi kedewasaan berpikir masyarakat; (6) mudahnya komunikasi

dan hubungan akrab antarpemuka agama; (7) koordinasi yang baik antaraparatur dan pemuka agama; (8) kepekaan yang positif dari pemuka agama untuk mengantisipasi secara dini kemungkinan munculnya gangguan kerukunan umat beragama (Lubis, 2005: 249-250).

Melihat situasi latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hubungan Muslim-Buddhis dalam situasi konflik di Kota Tanjungbalai perlu untuk dikaji secara lebih dalam melalui penelitian dengan fokus permasalahan yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang mendorong kelahiran konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai? 2) Siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? 3) Resolusi apa yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik?

Sebagaimana rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sosial antara Muslim-Buddhis dalam situasi konflik di Kota Tanjungbalai. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya konflik Patung Buddha di Kota Tanjungbalai; 2) untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam konflik tersebut; dan 3) mengetahui resolusi apa yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut.

Jika dilacak dalam literatur sejarah, cukup banyak karya dan studi ilmiah yang mengindikasikan ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama yang melibatkan umat Islam, namun hubungan tersebut cenderung berbenturan dengan Kristen. Sejarah kelim hubungan kedua agama ini disinyalir mulai mengalami titik klimaks dalam peristiwa Perang Salib yang terjadi beberapa tahap untuk waktu yang cukup lama (Goddard, 2003: 165-180).

Beberapa karya yang menampilkan "disharmonisasi" hubungan Muslim-Kristen bahkan mengindikasikan agama sebagai pemicu konflik. Karya-karya dimaksud, dapat disebutkan, antara lain: *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World* (Amstrong, 2001), dan *The Battle of God* (Amstrong, 2000), keduanya merupakan karya Karen Amrmstrong, serta *The Holy War Idea in Western and Islamic Tradition*,

karya James Turner Jhonson.

Literatur lain pada tingkat dunia yang mengindikasikan sejarah hubungan Muslim-Kristen yang diwarnai konflik adalah tulisan Mortimer (1991: 7-13) yang berjudul *Cristianity and Islam*. Dalam tulisan yang juga mengangkat Perang Salib sebagai indikator primer, Islam dikonsepsikan sebagai lawan dari agama dan kebudayaan Barat yang diasosiasikan dengan Kristen. Teori Mortimer ini didukung pula oleh Paul Rae dengan penjelasan yang lebih dalam. Menurut pandangannya, banyak umat Islam yang membenci blok Barat karena Negara Barat semakin kaya dan maju, pada saat yang sama Negara Islam semakin miskin oleh karena dieksploitasi oleh Negara Barat.

Sementara itu, untuk literatur tingkat nasional, kebanyakan literatur tentang hubungan Muslim-Kristen mengangkat kasus-kasus konflik, seperti Ambon dan Poso. Meski objek yang disoroti berkaitan dengan konflik antaragama, para pakar dan pemangku kepentingan di Indonesia terlihat cenderung menekankan faktor lain yang menjadi penyebab konflik. Arifin A. Segaf (2005), misalnya, memandang konflik Ambon dan Maluku sebagai bukan konflik agama, demikian halnya dengan Magnis Suseno (2005), yang memandang konflik-konflik tersebut sebagai bagian dari pengaruh sejarah, ekonomi, politik, dan kebijakan Orde Baru.

Berbagai literatur yang dikemukakan di atas dapat dikatakan sebagai literatur tentang hubungan Muslim-Kristen dalam teori sejarah. Selain dimensi sejarah ini, Hugh Goddard (2005) Guru Besar Universitas Licester Inggris, menambahkan lima dimensi yang lain untuk memahami interaksi Muslim-Kristen, yaitu: (1) dimensi teologis; (2) dimensi filosofis; (3) dimensi sosial; (4) dimensi politik; dan (5) dimensi ekonomi.

Sementara itu, belum ada karya yang bisa dirujuk terkait disharmonisasi hubungan sosial Muslim-Buddhis di Indonesia umumnya, dan Sumatera Utara khususnya.

## KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori konflik dengan beberapa asumsi dasar. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Teori konflik juga melihat adanya dominasi, korelasi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan.

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan "paksaan". Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan *power*. Terdapat dua tokoh sosiologi modern yang berorientasi serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf (Ritzer dan Goodman, 2007: 153-159).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan model studi kasus dalam pengertian yang sangat sederhana (Mudzakir, 2002: 54). Penelitian ini mengambil paradigma kualitatif yang menekankan fungsi teori sebagai alat untuk mempertajam kepekaan peneliti dalam melihat data dan merumuskan teori atas dasar

data yang diperoleh. Oleh karenanya, penelitian kualitatif tidak bersifat menguji teori, akan tetapi teori selalu dibangun pada akhir penelitian. Berkaitan dengan paradigma ini, Muhadjir (1989: 77) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif harus menyajikan generalisasi dan temuannya harus mempunyai sumbangan teoretik.

Mencermati paradigma kualitatif sebagaimana disebutkan di atas, maka teori pada penelitian ini dapat pula berfungsi sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan sebagai "pisau analisis" dalam menyajikan data. Oleh karenanya, pendekatan yang tepat dan selanjutnya akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi agama.

Penggalian data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan fakta kasus melalui pengamatan langsung atas situasi yang terjadi di lapangan terkait konflik yang terjadi.
2. Wawancara mendalam (*in depth interview*). Wawancara mendalam merupakan cara penggalian data yang terkait dengan faktor penyebab terjadinya konflik, siapa yang terlibat dan solusi yang telah dilakukan.
3. Studi literatur/dokumentasi. Studi literatur/dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data skunder melalui penelusuran literatur, dan dokumen-dokumen terkait.

Proses analisis terhadap data-data yang terkumpul dilakukan dengan prosedur kualitatif sebagaimana ditekankan Moleong, dimulai dengan terlebih dahulu menelaah data-data yang dikumpulkan, melakukan reduksi data melalui pembuatan abstraksi, kemudian mengkategorikan data (Moleong, 2006: 247). Mengacu pada prosedur tersebut, maka proses analisis data pada penelitian ini ditempuh melalui lima tahap, yaitu: (1) penelaahan data; (2) klasifikasi data sesuai dengan masalah yang dirumuskan; (3) perbandingan data; (4) deskripsi data; dan (5) penarikan kesimpulan.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tanjungbalai termasuk salah satu kota tertua di Sumatera Utara, yaitu sudah berumur sekitar 392 tahun, bila hari jadinya dinisbahkan kepada Kerajaan Asahan dimulai dengan penobatan raja pertama kerajaan tersebut yang berlangsung meriah di sekitar kampung Tanjung.<sup>1</sup> Nama kota “Tanjungbalai” bermula dari sebuah kampung yang ada di sekitar Ujung Tanjung di muara Sungai Silau dan aliran Sungai Asahan. Di tempat itu dibangunlah sebuah “Balai” (bangunan rumah tanpa dinding, semacam rumah singgah), lama kelamaan balai yang dibangun semakin ramai disinggahi karena tempatnya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas ataupun orang-orang yang ingin bepergian ke hulu Sungai Silau. Tempat itu kemudian dinamai “Kampung Tanjung” dan orang lazim menyebutnya Balai di “Tanjung”.<sup>2</sup>

Sejak dibukanya perkebunan-perkebunan di daerah Sumatera Timur termasuk daerah Asahan, maka Kota Tanjungbalai sebagai kota pelabuhan dan pintu masuk ke daerah Asahan menjadi penting artinya bagi perkembangan perekonomian Belanda. Dengan telah berfungsinya jembatan Kisaran dan dibangunnya jalan kereta api Medan-Tanjungbalai, maka hasil-hasil perkebunan dapat lebih lancar disalurkan atau diekspor melalui kota pelabuhan Tanjungbalai.

Untuk memperlancar kegiatan perkebunan, maskapai Belanda membuka kantor dagangnya di kota Tanjungbalai antara, maka pada abad 20 mulailah penduduk bangsa Eropa tinggal

menetap di Kota Tanjungbalai. Asisten Resident van Asahan berkedudukan di Tanjungbalai dan karena jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan (Voorzitter van den Gemeen-teraad). Sebagai kota pelabuhan dan tempat kedudukan Assisten Resident, Tanjungbalai juga merupakan tempat kedudukan Sultan Kerajaan Asahan.

Perkembangan Kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun semakin berkembang, para pendatang dari berbagai tempat dengan tujuan untuk berdagang,<sup>3</sup> kemudian menetap di Tanjungbalai, sehingga kota ini telah menjadi kota yang berpenduduk padat.

Penduduk di Kota Tanjungbalai memiliki beberapa etnis yaitu: Batak (42%), Jawa (17,06%), Melayu (15,41 %), Minang (3,58%), Aceh (1,11%), dan lain-lain (20,28%); dengan agama yang dianut adalah Islam (83,30%), Kristen (8,44%), Katolik (0,76%), Hindu (0,04%), Buddha (7,44%), dan Khonghucu (0%).<sup>4</sup>

Sebelum berdirinya Patung Buddha di Vihara Tri Ratna, interaksi sosial Muslim-Buddhis di Kota Tanjungbalai cukup baik. Hal yang dapat membuat pemeluk Muslim dengan pemeluk Buddha kompak ialah adanya hubungan yang akrab di antara mereka. Beberapa orang Buddha ada yang mengangkat orang Melayu muslim sebagai anaknya, menyekolahkan di sekolah kelautan serta mempekerjakannya sebagai nakhoda kapal. Interaksi Muslim-Buddhis dapat juga dilihat dari sektor perekonomian, pemeluk agama Buddha yang menguasai perekonomian di

<sup>1</sup> Peristiwa penobatan raja pertama Kerajaan Asahan tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 27 Desember 1620, dan tanggal 27 Desember kemudian ditetapkan sebagai “Hari Jadi Kota Tanjungbalai” dengan surat keputusan DPRD Kota Tanjungbalai Nomor: 4/DPRD/TB/1986 Tanggal 25 November 1986.

<sup>2</sup> Sekarang ini telah dibangun sebuah gedung duplikat dari “Balai” yang berada di Ujung Tanjung, tak jauh dari posisi Vihara Tri Ratna. Maksud dibangunnya duplikat “Balai” tersebut adalah sebagai simbol bahwa tempat itulah yang dinamakan “Tanjungbalai”. Bangunan “Balai” yang bernuansa budaya Melayu itu sekaligus sebagai simbol bahwa Kota Tanjungbalai adalah kota orang Melayu.

<sup>3</sup> Sekitar tahun 1860 komunitas pedagang Cina telah menjalin hubungan dengan Kerajaan Melayu di Pantai Timur termasuk di Kota Tanjungbalai (Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia* [Jakarta: Pustaka Obor, 2011], h. 194).

<sup>4</sup> Diolah (dipersentasekan) berdasarkan data penduduk setiap kecamatan dan BPS Kota Tanjungbalai tahun 2010.

Tanjungbalai mampu menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk Muslim yang menjalin kerja sama dengannya. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan kapal di Tanjungbalai, dari sekian banyak kapal yang ada di Tanjungbalai, hanya 1 (satu) kapal yang dimiliki oleh orang pribumi.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, keharmonisan antara Muslim-Buddhis menjadi berkurang. Adanya salah paham karena kurangnya pengetahuan orang Muslim yang menyebabkan munculnya iri hati serta kecemburuan sosial kepada orang Buddhis di Tanjungbalai, yakni ketidakpahaman orang Muslim membedakan mana orang Cina yang beragama Khonghucu dan mana orang Cina yang beragama Buddha, sehingga kelenteng yang menjadi rumah ibadah orang Khonghucu dianggap mereka rumah ibadah orang Buddha.<sup>6</sup> Mereka tidak paham bahwa agama Buddha memiliki beberapa aliran yang berbeda, berbeda aliran berbeda pula rumah ibadahnya. Banyak sekali rumah ibadah orang Buddha di Tanjungbalai, sehingga berdirinya beberapa Vihara dianggap berlebihan bagi sebahagian masyarakat muslim, sehingga muncullah perasaan bahwa Tanjungbalai telah dikuasai oleh orang Cina (Buddha).

Jauh sebelum ada persoalan "Patung Buddha" interaksi muslim dengan Buddhis terjadi secara alamiah sebagaimana telah disinggung di atas, dan kalau dapat disimpulkan bahwa interaksi Muslim-Buddhis terjadi dalam bentuk hubungan antara etnis Cina dengan etnis Melayu pada umumnya; akan tetapi Melayu yang ada di Tanjungbalai termasuk dalam kategori "muslim" bukan semata-mata "etnis". Karena orang Batak yang menganut agama Islam di daerah ini disebut masuk "Melayu". Sebelum tahun 1980-an pada umumnya orang Batak yang muslim di Tanjungbalai, tidak mau menyebut diri mereka sebagai orang Batak, dengan memakaikan "marga" di belakang nama mereka.

Interaksi Muslim dengan Buddhis, walaupun yang muslim adalah suku Melayu (etnis Melayu), suku Batak, Jawa (yang berada di kampung Jawi-Jawi), Aceh dan lain sebagainya; pada umumnya bentuk interaksinya adalah "ketergantungan" terutama dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian sebagai buruh nelayan.

Masyarakat Cina yang dipahami sebagai masyarakat penganut agama Buddha adalah menguasai bisnis dengan bertempat tinggal di pusat kota. Rumah Toko (Ruko) yang terdapat di jalan Masjid, Jl. Gereja, Jl. Sudirman, Jl. Veteran dan Jl. Asahan (tempat Vihara Tri Ratna berada) hampir semuanya milik masyarakat Cina.

Masyarakat Cina yang berada di pusat Kota Tanjungbalai menguasai bisnis dan perekonomian. Masyarakat "pribumi" Batak yang telah menjadi Melayu ataupun orang Batak yang beragama Kristen, sebagaimana yang mengelompok tinggal di daerah tertentu, telah bekerja kepada orang Cina sebagai buruh atau "anak kapal". Akan tetapi belakangan ini "toke-toke" Cina yang mempunyai kapal-kapal besar, mencari pekerjanya dari daerah luar Kota Tanjungbalai, karena orang Melayu yang kini bertempat tinggal di pinggiran Sungai Silau ataupun di pinggiran Sungai Asahan telah mempunyai sampan sendiri. Sementara itu hanya sedikit orang Kristen yang diambil oleh orang Cina sebagai pekerjanya.

Kedekatan masyarakat Buddhis (Cina) dengan masyarakat Muslim, digambarkan oleh Mailin, salah seorang dosen Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, yang ayahnya (Pak Yahya) adalah seorang Nakhoda Kapal sekaligus adalah anak angkat dari seorang "toke" (pemilik kapal) etnis Cina yang beragama Buddha, bernama Tonghi (Ketua Yayasan Kemalangan Sosial): bahwa ketika pernah terjadi "kerusuhan" etnis, antara orang Cina (Buddha) dengan orang Batak (Kristen), di Tanjungbalai beberapa tahun yang lalu. Justru keluarga Mailin yang muslim menjadi

<sup>5</sup> Wawancara dengan salah seorang nelayan di kampung Pangkal Tembok, tanggal 7 Agustus 2011.

<sup>6</sup> Secara kebetulan bahwa Vihara Tri Ratna berada tepat di sebelah Klenteng Dwi Samudra, sama-sama menghadap ke arah timur, ke Sungai Silau yang besar dan tempat rekreasi yang bernama "Pantai Amor".

tempat berlindung keluarga Cina yang Buddhis.<sup>7</sup>

Terkait dengan masyarakat Buddhis dan Vihara Tri Ratna, bahwa paling kurang sekali setiap tahun, Vihara Tri Ratna melakukan upacara “peringatan hari jadi” Vihara, dengan cara membagi-bagikan beras dan minyak goreng kepada masyarakat muslim yang berada di sekitar Vihara atau yang datang beramai-ramai di halaman Vihara.

Halaman Vihara Tri Ratna yang luas terdapat lapangan bola voli yang selama ini digunakan anak muda atau remaja muslim untuk bermain bergabung dengan pemuda dan remaja Buddhis. Hal ini dikarenakan bahwa posisi Vihara Tri Ratna tepat menghadap Sungai Asahan. Pantai “Amor” tempat berkumpulnya para remaja terutama pada hari Minggu.

Interaksi antara pemuda dan pemudi Buddhis dengan pemuda dan pemudi Muslim terjadi di Pantai Amor tepat di depan Vihara Tri Ratna. Beberapa penjual makanan dan minuman yang berada di Pantai Amor dikunjungi oleh sebagian masyarakat Buddhis yang datang berkunjung ke Vihara pada hari Minggu atau hari besar lainnya.

Abang becak yang menunggu dan mengantar sewa yang datang dan dari Vihara Tri Ratna, tentu adalah orang Muslim yang juga mendapat rezeki dari adanya pengunjung Vihara pada hari-hari tertentu. Kunjungan ke Vihara Tri Ratna ada yang dengan maksud melakukan ibadah dan persembahan, tetapi ada juga yang berkunjung biasa, rekreasi; karena Vihara Tri Ratna terbuka

untuk umum sebagai tempat yang dikunjungi oleh wisatawan lokal, dan regional. Bahkan pada tanggal 8 Nopember 2011, Vihara Tri Ratna menerima kunjungan mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan, tepatnya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah, semester V dengan mata kuliah Ilmu Perbandingan Agama. Mahasiswa diberi kuliah umum tentang Agama Buddha dan sejarah Vihara Tri Ratna. Mahasiswa dan mahasiswi yang memakai jilbab diberi kebebasan untuk berfoto di berbagai tempat bahkan di tempat yang dipandang suci sekalipun.

Hubungan pemerintah yang notabene adalah muslim dengan masyarakat Buddhis terjalin sangat baik, bahkan menurut pengakuan salah seorang guru agama Buddha yang kini mengabdikan di Vihara Tri Ratna, Walikota terpilih Drs. H.M. Thamrin Munthe, M.Hum. didukung oleh masyarakat Buddhis, padahal dia adalah alumnus dari IAIN Sumatera Utara dan seorang ulama muslim.<sup>8</sup>

Menurut pengakuan salah seorang aktivis Buddhis yang sempat diwawancarai terkait dengan hubungan sosial Muslim-Buddhis, bahwa semasih menjadi Wakil Walikota, ustaz Thamrin Munthe sangat dekat dengan masyarakat Buddhis, bahkan dialah yang melakukan penggungtingan pita tanda diresmikannya penggunaan Vihara Tri Ratna yang telah selesai dibangun kembali.<sup>9</sup>

Dalam proses pembangunan kembali Vihara Tri Ratna banyak pihak yang terlibat, terutama dalam hal pembiayaan. Sebagian orang Cina yang beragama Khonghucu juga turut berpartisipasi,

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mailin, tanggal 28 September 2011 di Medan.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rudi, S.T., salah seorang aktivis Buddhis Kota Tanjungbalai, pada tanggal 8 Oktober 2011.

<sup>9</sup> Dokumen, *Peresmian Penggunaan Vihara Tri Ratna yang telah Selesai Dibangun Kembali*. Sekitar tahun 1974 agama Buddha mulai dikembangkan di kota Tanjungbalai oleh Y.A Bhikku Jinadhammo Maha Thera dengan didampingi Upasakha Khantineri dan Upasakha Nora beserta Ibu Susianny Intan yang mana pada saat itu beliau adalah guru bidang studi IPS dan terakhir beralih menjadi salah seorang guru agama Buddha yang cukup disegani. Pada Tahun 1984 Ibu Susianny Intan beserta rombongan umat Buddha mengikuti Sarasehan Buddhis di Pacet Cipanas. Sewaktu Sarasehan para Sangha Agung Indonesia dan para panditta dari Majelis Buddhayana Indonesia begitu antusias memberikan dorongan semangat kepada Ibu Susianny Intan agar dapat menghimpun para tokoh-tokoh masyarakat di kota Tanjungbalai Asahan untuk bersama-sama membangun sebuah Vihara sendiri agar para umat Buddha di Kota Tanjungbalai Asahan dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Akhirnya pembangunan Vihara pun selesai pada tanggal 3 November 1984 pukul 02.00 WIB, kemudian diadakanlah upacara ritual yang dipimpin oleh Maha Nayaka Sangha Agung Indonesia Y.A Maha Stavira Ashin Jinarakhita (alm). Peresmian penggunaan Vihara Tri Ratna dilaksanakan pada pagi hari tanggal 3 November 1984 yang diresmikan oleh Walikota Tanjungbalai Asahan Bapak H. Ibrahim Gani (alm).

karena didasari kepercayaan bahwa memberikan uang atau harta untuk kepentingan rumah ibadah, akan mendapat balasan berupa rezeki yang melimpah ruah. Oleh sebab itu bagi etnis Cina baik beragama Buddha ataupun Khonghucu terutama bagi mereka yang datang dari daerah Bagan Siapiapi, Tanjungbalai Karimun merupakan tempat mengembangkan bisnis di Kota Tanjungbalai Asahan, dan solidaritas antarsesama keturunan Cina sangat kuat.

Vihara Tri Ratna terletak di tengah kota Tanjungbalai persisnya di Jalan Asahan Tanjungbalai, Sumatera Utara. Didirikan sejak tahun 2006 dengan luas bangunan 1.432 meter persegi yang terdiri dari empat lantai. Vihara tersebut dibangun dengan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota dengan No. 648/237/K/2006. Di atas lantai 4 Vihara tersebut didirikan Patung Buddha Amitabha dengan tinggi 6 meter yang diresmikan sejak tanggal 8 November 2009. Patung Buddha tersebut merupakan satu kesatuan dengan Vihara Tri Ratna.

Saat ini Vihara Tri Ratna merupakan salah satu Vihara di Kota Tanjungbalai yang melayani sekitar 2.000 orang umat Buddha. Selain Vihara, di Kota Tanjungbalai juga terdapat 3 Klenteng sebagai tempat sembahyang umat Buddha. Sejak diresmikan, Vihara tersebut digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha dengan nyaman.

Namun, kenyamanan umat Buddha itu mulai terusik pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010, beberapa ormas yang mengatasnamakan "Gerakan Islam Bersatu" melakukan demonstrasi ke kantor DPRD dan Walikota Tanjungbalai. Mereka mendesak pemerintah menurunkan Patung Buddha dengan alasan bahwa keberadaan patung tersebut tidak mencerminkan kesan islami di Kota Tanjungbalai dan dapat mengganggu keharmonisan di tengah-tengah masyarakat.

Hal yang menjadi penyebab konflik Patung Buddha di Vihara Tri Ratna adalah:

a) *Politik*. Ketika itu Walikota Sutrisno sudah hampir berakhir untuk dua kali Pemilukada, dan dia tidak bisa lagi ikut berkompetisi, tetapi

anaknyanya tampil sebagai calon. Sementara itu ada seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Tanjungbalai berkeinginan juga untuk tampil sebagai kandidat, akan tetapi tidak begitu dikenal masyarakat, walaupun cucu salah seorang ulama (alm) "besar" di Kabupaten Asahan asal Tanjungbalai; diduga dialah yang mengembangkan isu Patung Buddha. Isu tersebut berkembang, bahwa keberadaan Patung Buddha yang cukup tinggi di atas Vihara Tri Ratna membuat warga kampung Jawi-Jawi dan kampung Sei Nangka Kecamatan Sei Kepayang Barat yang mayoritas muslim dan beretnis Jawa merasa terganggu. Kebetulan kedua kampung tersebut berada di sebelah timur Vihara Tri Ratna (Posisi Patung Buddha menghadap ke Sungai Silau yang besar dan cukup lebar untuk menjadi tempat berlabuh kapal "Tongkang", dan di seberang sungai tersebut adalah kampung Jawi-Jawi dan kampung Sei Nangka). Ketika masyarakat muslim di kedua kampung itu melaksanakan shalat, maka mereka seolah menghadap Patung Buddha yang kelihatan berdiri kokoh dengan posisi menghadap masyarakat muslim yang berada di seberang sungai Silau tadi. Isu teologis inilah yang dijadikan alat pemicu hadir dan turunnya sekelompok orang mengenakan jubah putih dan sorban yang mengatasnamakan umat Islam Tanjungbalai, menuntut ke gedung DPR agar pemerintah menyarankan supaya patung itu diturunkan dan diletakkan di tempat lain di Vihara Tri Ratna.

b) *Kecemburuan Sosial*. Sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Islam Bersatu menuntut agar pemerintah menurunkan Patung Buddha Amitabha atau Buddha Rupang yang berada di atas bangunan Vihara Tri Ratna. Gerakan ini tidak dipahami sebagai gerakan masyarakat Muslim secara umum, baik dari segi orang-orang yang ikut demonstrasi, motif, isu yang dikembangkan, dan siapa di balik gerakan itu. Namun suatu kenyataan yang seolah mewakili perasaan masyarakat muslim, baik etnis Melayu, Jawa, Batak dan yang lainnya adalah khawatir bila identitas Tanjungbalai sebagai "Kota Kerang" tergantikan sebagai "Kota Cina" mengingat



mayoritas penduduk kota adalah orang Cina. Kesuksesan etnis Cina dalam berbisnis dan menguasai perekonomian terasa tak mungkin lagi diimbangi oleh penduduk asli yang beragama Islam. Pemilik kapal “Tongkang” hampir semuanya adalah orang Cina, hanya satu orang “Melayu” yang mempunyai kapal “Tongkang”, itupun saat ini hanya tinggal satu buah saja.<sup>10</sup>

Masyarakat muslim Tanjungbalai kebanyakan adalah orang bermarga, kakek-nenek mereka adalah orang Batak yang masuk Islam, sebutlah Irwansyah Sianipar pengusaha muda yang tinggal di Jl. Veteran, tidak berapa jauh dari Jl. Asahan Gg. Vihara, di mana Vihara Tri Ratna berada, ia mengatakan: dibanding terhadap agama Kristen bahwa kecemburuan terhadap agama Buddha lebih kuat akibat penguasaan orang Cina terhadap perekonomian hampir di segala bidang. Meskipun baru kali ini muncul persoalan—konflik Patung Buddha—antara umat Islam dengan penganut agama Buddha, tetapi sebenarnya “perasaan tidak senang dengan orang Cina” sudah terpendam sejak lama. Sementara itu penganut agama Kristen yang notabene orang Batak hubungan mereka dekat dengan masyarakat muslim di Tanjungbalai.<sup>11</sup>

Isu teologis yang dikembangkan bahwa sebagian masyarakat Desa Sei Nangka dan masyarakat Desa Jawi-Jawi yang berada di seberang Sungai Asahan yang apabila shalat menghadap Vihara Tri Ratna dan Patung Buddha, adalah benar-benar menjadi “isu”. Karena sepanjang penelitian ini dilakukan, masyarakat Pangkal Tembok dan Desa Jawi-Jawi sama sekali tidak begitu peduli dengan keberadaan Patung Buddha, apalagi dihubungkan dengan arah kiblat mereka. Karena posisi Vihara Tri Ratna tidak tepat di arah kiblat mereka. Di Desa Sei

Nangka ada sebuah masjid yang posisinya bila ditarik garis lurus dari Barat ke Timur hampir tepat di depan Vihara, akan tetapi kiblat masjid bila di tarik garis lurusnya menghadap muara Sungai Silau tempat di mana pembangunan “masjid terapung” direncanakan. Demikian juga isu bahwa masyarakat Desa Sei Nangka yang turun berdemonstrasi adalah juga tidak benar. Walhasil kelompok Gerakan Islam Bersatu (GIB) sepertinya “tanpa wujud” dalam masyarakat.<sup>12</sup> Para demonstran bukan penduduk Sei Nangka sebagaimana diberitakan—mereka memang merencanakan tetapi tidak pernah terjadi. Sekarang pun tidak lagi menjadi masalah mengenai “shalat menghadap arah Patung”, karena kiblat sudah bergeser agak lebih miring ke arah barat laut, bukan ke barat. Posisi Patung tepat di arah barat bagi penduduk kampung Sei Nangka, akan tetapi bagi penduduk kampung Jawi-Jawi memang ketika shalat tepat menghadap posisi di mana Patung Buddha berdiri tegak dan tinggi terlihat dari seberang sungai yang dihadapi oleh Patung Buddha itu.<sup>13</sup>

c) *Fanatisme dan Simbolisme*. Semangat keislaman terkait doktrin bahwa Islam merupakan agama terbaik, dan Kota Tanjungbalai bukan kota Buddha tetapi kota umat Islam. Sementara itu tidak jauh dari Vihara Tri Ratna sudah dibangun sebuah gedung “Balai” sebagai simbol kota Tanjungbalai, tetapi kemegahan bangunan balai itu menjadi hilang dengan adanya Vihara Tri Ratna, apalagi dengan patung besar dan tinggi yang berada di atasnya. Namun yang dituntut oleh masyarakat Islam bukanlah pemilik Vihara yang kebetulan sudah meninggal karena kecelakaan, melainkan pemerintah: mengapa mengizinkan hal itu. Setelah shalat Jumat di Masjid Raya umat Islam mendatangi kantor DPR agar memberikan

<sup>10</sup> Wawancara dengan Pak Adi, penduduk Desa Pangkal Tembok, tanggal 1 Oktober 2011.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Irwansyah Sianipar, tanggal 1 Oktober 2011.

<sup>12</sup> Wawancara dengan salah seorang pengurus masjid di Desa Sei. Nangka, tanggal 1 Oktober 2011.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Fitriyani, Bendahara DPRD Tanjungbalai, tanggal 7 Agustus 2011.

tekanan kepada pemerintah untuk dapat menghimbau supaya patung itu diturunkan.<sup>14</sup>

Keberadaan Patung Buddha di atas Vihara Tri Ratna membuat Vihara terlihat lebih menonjol dibandingkan Balai yang merupakan monumen Tanjungbalai yang letaknya di timur laut berhadapan dengan Vihara Tri Ratna. Sehingga kapal-kapal yang masuk ke Tanjungbalai terlebih dahulu melihat Vihara Tri Ratna dibandingkan Balai yang merupakan simbol dari Kota Tanjungbalai, hal tersebut membuat masyarakat kesal karena seolah-olah Vihara Tri Ratna telah menjadi simbol Kota Tanjungbalai yaitu sebagai "Kota Cina".

Peristiwa demonstrasi yang meminta agar "Buddha Rupang" (Patung Buddha Amitabha) yang berada di atas gedung Vihara Tri Ratna, diturunkan, membuat umat Buddha Kota Tanjungbalai merasa tidak nyaman untuk melaksanakan ibadahnya, bahkan merasa terintimidasi. Lebih jauh berkembanglah isu bahwa jika umat Buddha tidak menurunkan Patung Buddha tersebut maka kemungkinan Peristiwa 1998 (penjarahan dan tindakan pelanggaran HAM lainnya yang menimpa Komunitas Cina) akan terulang kembali.

Masyarakat etnis Cina di Kota Tanjungbalai memprotes rencana Pemkot Tanjungbalai untuk menurunkan Patung Buddha dari atas Vihara Tri Ratna. Walikota Tanjungbalai, Sutrisno Hadi mengaku mendapat tekanan dari masyarakat setempat untuk menurunkan Patung Buddha tersebut. Namun, banyak pihak yang mencurigai kebijakan tersebut dilatarbelakangi motif politik.

Bagi penganut agama Buddha, pendirian Walikota Sutrisno menunjukkan gelagat yang mengabaikan agama dan mengancam prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Salah seorang etnis Cina, W. Lie, mengaku kaget mengetahui keputusan tersebut diambil berdasarkan persetujuan bersama antara pemerintah dan pemuka agama,

bahkan termasuk kalangan penganut agama Buddha. Lie mengatakan bahwa mengenal perwakilan agama Buddha yang turut dalam kesepakatan bersama tersebut. Dia menilai keterlibatan orang-orang tersebut sama sekali tidak berlandaskan keinginan sendiri. Lie berkata bahwa penatua Vihara Tri Ratna, Suwanto Siana, dikabarkan telah didesak untuk menandatangani kesepakatan menurunkan Patung Buddha karena di bawah tekanan. "Sayangnya, kami tidak berkesempatan untuk menanyakan siapa yang telah mengintimidasi Suwanto, karena sebelumnya dia mendapat kecelakaan karena ditabrak becak dari belakang dan meninggal seminggu kemudian," ujar Lie. Lie menambahkan bahwa masyarakat Cina sama sekali tidak menyetujui keputusan tersebut, meskipun surat kesepakatan bersama tersebut telah ditandatangani semua pihak, termasuk dari kaumnya. Dikatakannya, upaya menurunkan patung tersebut melukai perasaan para pemeluk agama Buddha. "Kami tidak akan menurunkan patung tersebut. Kami tidak berani, karena ini menyangkut kepercayaan kami. Bila pihak pemko ingin menurunkannya, mereka bisa saja melakukannya, karena kami tidak berdaya menghadapi pemerintah karena masyarakat Cina yang merupakan penganut agama Buddha di Tanjungbalai khawatir menimbulkan provokasi karena menentang keputusan tersebut," kata Lie.

Koordinator Aliansi Sumut Bersatu, Veryanto Sitohang menyatakan:

Kejadian ini menunjukkan bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai telah kalah terhadap tekanan dari sekelompok kecil masyarakat yang ingin memaksakan kehendaknya dan tidak menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, khususnya di Tanjungbalai. Pada akhirnya ini akan mencoreng wajah Kota Tanjungbalai, bahkan Indonesia di mata internasional yang selama ini mengakui keberagaman suku, agama, budaya, dan adat-istiadat sebagai modal dasar yang menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan salah seorang Cina Muslim yang bekerja di sebuah toko Cina Budhis di Jl. Gereja kota Tanjungbalai, tanggal 7 Agustus 2011.

Aksi-aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Muslim tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak sehingga mendorong pemerintah dan organisasi keagamaan melakukan berbagai langkah yang ditandai dengan berbagai surat untuk menyikapi persoalan tersebut.

Beberapa surat yang berhasil didokumentasikan ialah:

1. Tanggal 3 Juni 2010, surat dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Sumut No. 60. 0-1/FKUB-I/VI/2010 perihal himbauan kepada FKUB Tanjungbalai dan masyarakat agar proaktif menangani kasus penurunan Patung Buddha Amitabha dan mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, tidak melakukan tindakan anarkis dan menjaga perdamaian.
2. Tanggal 8 Juni 2010, surat dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Agama Buddha dengan No. DJ. VI/3/BA.02/604/2010 yang ditujukan kepada Ketua Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai. Inti dari surat tersebut adalah meminta supaya Patung Buddha Amitabha dipindahkan ke pelataran atau tempat lain yang terhormat.
3. Tanggal 12 Juni 2010, surat dari Yayasan Vihara Tri Ratna Tanjungbalai dengan No. 05/YVTR-VI/2010 yang ditujukan kepada Menteri Agama Dirjen Bimas Agama Buddha. Surat tersebut menanggapi surat Menteri Agama dimana Yayasan Vihara Tri Ratna menyasalkan surat Menteri Agama yang meminta mereka untuk menurunkan Patung Buddha. Sehubungan dengan hal tersebut, Yayasan Vihara Tri Ratna meminta Menteri Agama meninjau ulang surat tersebut karena Patung Buddha merupakan satu kesatuan dengan Vihara dan selama ini tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
4. Tanggal 16 Juni 2010, surat dari Pengurus Daerah Majelis Buddhayana Indonesia dengan No. 085/MDI-Sumut/VI/2010 yang ditujukan kepada Dirjen BIMAS Umat Buddha Kementerian Agama. Surat tersebut sangat menyayangkan surat Dirjen Bimas Kementerian Agama yang tidak mendengar pendapat berbagai pihak khususnya umat Buddha di Kota Tanjungbalai.
5. Tanggal 18 Juni 2010, surat dari Walikota Tanjungbalai yang ditujukan kepada Pengurus Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai. Surat tersebut menindaklanjuti surat Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor: DJ. VI/3/BA.02/604/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal pemberitahuan agar dapat memindahkan posisi Patung Buddha Amitabha ke pelataran Vihara Tri Ratna atau ke tempat lain yang terhormat yang ditujukan kepada Pengurus Vihara Tri Ratna untuk dapat merespons isi surat secara bijaksana demi kepentingan kerukunan umat beragama di Kota Tanjungbalai.
6. Tanggal 23 Juni 2010 surat dari Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Agama Buddha yang ditujukan kepada ketua Vihara Tri Ratna dan yang ditujukan kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumut perihal mohon bantuan penyelesaian masalah Patung Buddha Vihara Tri Ratna agar dilakukan secara kekeluargaan.
7. Tanggal 28 Juni 2010, surat dari Gerakan Islam Bersatu (GIB) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tanjungbalai dengan No. 014/GIB-TB/VI/2010, perihal membahas sejauh mana perkembangan mengenai tindak lanjut permasalahan Patung Buddha yang mana telah diketahui adanya surat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Buddha.
8. Tanggal 15 Juli 2010, surat dari MUI Kota Tanjungbalai, ditujukan kepada Walikota Tanjungbalai dengan No. 010/DP.11/S/VII/2010 perihal saran dan himbauan sehubungan dengan adanya keresahan masyarakat Tanjungbalai yang ditandai dengan adanya unjuk rasa elemen-elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Islam Bersatu ke kantor DPRD Tanjungbalai

pada tanggal 30 Mei 2010 dan 29 Juni 2010 yang keberatan terhadap letak Patung Buddha Amitabha yang berada di atas lantai 4 Vihara Tri Ratna di Jl. Asahan Kota Tanjungbalai. MUI juga menyesalkan surat Dirjen Bimas Agama Buddha Kementerian Agama yang meminta mencabut surat sebelumnya karena mengganggu keharmonisan masyarakat.

9. Tanggal 30 September 2010, surat Walikota Tanjungbalai yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, Kapolres, Dandim 0208 Asahan, Kakan Kementerian Agama Tanjungbalai, Ketua FKUB Kota Tanjungbalai, Ketua MUI dan Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna No. 100/18348/T-an/2010 perihal penyampaian kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan Patung Buddha Amitabha.
10. Sehubungan dengan hal tersebut Walikota telah memprakarsai penandatanganan kesepakatan bersama pada tanggal 3 Agustus 2010 sebagai bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi antara unsur Muspida Plus Walikota Tanjungbalai dengan Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai dan Gerakan Islam Bersatu pada hari Rabu 28 Juli 2010, Rapat Walikota dengan Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna Senin, 2 Agustus 2010 yang menyatakan memindahkan posisi Patung Buddha ke tempat lain yang terhormat tanpa mengurangi kehormatan yang dilakukan oleh Pengurus Vihara. Kesepakatan ini dibuat tanggal 3 Agustus 2010.
11. Tanggal 30 September 2010 surat dari Walikota Tanjungbalai yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna dengan No. 100/18349/T-an/2010 perihal tindak lanjut kesepakatan bersama dan mempertanyakan mengapa pihak Yayasan Vihara Tri Ratna belum menurunkan Patung Buddha. Walikota juga mengingatkan agar

Pengurus Yayasan Vihara Tri Ratna sesegera mungkin menurunkan Patung Buddha Amitabha sebagaimana disepakati dalam surat kesepakatan bersama.

12. Tanggal 23 Februari 2011, surat dari Walikota Tanjungbalai yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai, menindaklanjuti surat Walikota Tanjungbalai No 100/18349/Pem-an/2010 tanggal 30 September 2010 perihal Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Penyelesaian Permasalahan Patung Buddha Amitabha yang pada intinya agar pihak yayasan Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai melakukan pemindahan posisi Patung Buddha Amitabha yang terletak di atas Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai ke tempat yang terhormat. Berdasarkan pengamatan di lapangan hingga saat ini pihak Yayasan Vihara Tri Ratna belum melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut.

Selain surat-surat tersebut, untuk meredam konflik yang terjadi dikarenakan berdirinya Patung Buddha di atas Vihara Tri Ratna beredarlah isu bahwa akan didirikan sebuah masjid terapung di muara Sungai Silau yang bertemu dengan Sungai Asahan. Posisi masjid terapung akan berada di antara Gereja yang terletak di S. Dengki dan Vihara Tri Ratna. Rencananya masjid terapung dibangun sangat megah untuk menghibur hati umat Islam agar tidak keberatan terhadap Patung Buddha di Vihara Tri Ratna dan Kota Tanjungbalai akan dibuat menjadi Kota Wisata Religius, yaitu kota wisata dengan tempat-tempat ibadah yang megah dari berbagai agama di Indonesia.

Sampai saat ini belum bisa dipastikan tentang kebenaran isu ini, akan tetapi isu ini diharapkan mampu meredam konflik antarumat beragama sehingga dapat menciptakan keharmonisan serta kerukunan antarumat beragama di Kota Tanjungbalai.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Menurut salah seorang informan yang bekerja di Kantor DPRD, yang tidak mau disebut namanya, bahwa anggaran untuk membangun masjid terapung di muara sungai Silau, sudah masuk ke DPRD Tanjungbalai dan direncanakan untuk tahun anggaran 2012; wawancara tanggal 13 Nopember 2011.



Akan tetapi sebagian masyarakat Melayu muslim yang berada di sekitar Vihara Tri Ratna, berkomentar bahwa pembangunan masjid “terapung” dengan kapasitas 10.000 jama’ah bukanlah solusi, apalagi kalau biaya pembangunannya berasal dari pemerintah; karena hal itu dianggap pemborosan, dan sebagai umat Islam mereka tidaklah nyaman ada masjid besar, tapi tidak efisiensi dalam hal fungsinya.<sup>16</sup>

## PENUTUP

Persepsi bahwa Buddhis sama dengan Cina ini justru dapat dijadikan sesuatu yang dapat disebut sebagai “potensi” keretakan hubungan sosial Muslim-Buddhis di Tanjungbalai. Ketidapkahaman masyarakat muslim memisahkan etnisitas dengan religiositas adalah satu masalah, di samping justru pemanfaatan ketidapkahaman masyarakat oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik tetapi isu teologis yang dikedepankan, atau pola keberagamaan yang fanatik dan simbolik, adalah puncak masalah yang dapat menjadikan hubungan sosial Muslim-Buddhis bukan hanya “retak” tetapi mungkin “pecah”.

Stereotip mempersamakan Cina dengan Buddhis dalam masyarakat “Melayu” seperti “gayung bersambut” dengan perasaan masyarakat Cina yang juga merasa “tersinggung” terhadap sikap kaum muslim yang ingin menurunkan Patung Buddha Amitabha yang berada di puncak gedung Vihara Tri Ratna, walaupun “mereka” tidak pernah beribadah di Vihara tetapi di Kelenteng Dwi Samudra (Khonghucu).

Kearifan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga kerukunan, kelompok masyarakat dan bahkan masyarakat Tanjungbalai pada umumnya, telah berhasil meredam konflik “Patung Buddha” dengan berbagai proses yang telah ditempuh, intinya sampai saat ini “Buddha Rupang” yang berdiri megah di atas Vihara Tri Ratna, menghadap Sungai Asahan dan beberapa

perkampungan muslim yang berada di seberang sungai belum diturunkan sebagaimana harapan sekelompok muslim yang mengatasnamakan “Gerakan Islam Bersatu” (GIB). Salah satu “obat penenang” yang diberikan adalah “harapan” akan dibangunnya sebuah masjid berkapasitas 10.000 jama’ah di Muara Sungai Silau yang disebut sebagai “Masjid Terapung”, sebagai ganti simbol kemegahan pengganti “Balai” yang kini “terkalahkan” dengan kemegahan Vihara Tri Ratna dengan “Buddha Rupang” di atasnya. Intinya adalah “kecemburuan” dan “keberhalaan”, keduanya adalah penyebab keretakan, mungkin secara teoritis, bukan hanya antara Muslim dan Buddhis, dan menjadi penyebab rusaknya hubungan antarumat beragama, tetapi runtuhnya persaudaraan dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Karen. 2000. *The Battle for God*. New York: Alfred A. Knopf.
- Armstrong, Karen. 2001. *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*. New York: Anchor Books.
- Assegaf, Arifin. 2005. “Memahami Sumber Konflik Antar Iman”. Dalam *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Th. Sumartana (ed). Yogyakarta: Institute DIAN.
- Dokumen, *Peresmian Penggunaan Vihara Tri Ratna yang Telah Selesai Dibangun Kembali*.
- Dokumentasi, *Surat-Surat yang Masuk ke DPRD Kota Madya Tanjungbalai*, tentang Patung Buddha di Vihara Tri Ratna.
- Goddard, Hugh. 2005. “Enam Dimensi Hubungan Kristen-Islam”. Dalam *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik, dan Pendidikan*. Alif Theria Wasim, dkk (ed). Yogyakarta: Oasis Publisher.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Irwansyah, seorang pengusaha muda yang tinggal di sekitar Vihara Tri Ratna, tanggal 16 Oktober 2011.

- \_\_\_\_\_. 2013. *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen: Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia*. Terjemahan: Zaimuddin dan Zaimul Am. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Irwansyah. 2004. "Perkembangan Pemikiran Tentang Konsep Kerukunan Hidup Umat Beragama: Suatu Analisis". Dalam *Konsep Kerukunan Hidup Umat Beragama: Kumpulan Karya dalam Konteks Pluralitas Agama dan Budaya*. H. M. Ridwan Lubis, dkk (ed). Jakarta: Citapustaka Media.
- Kahmad, Dadang. 2006. *Sosiologi Agama*, cet IV. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Kung, Hans. 1991. *Global Responsibility In Search of a New World Ethic*. New York: Crossroad Publishing Company.
- Lubis, M. Ridwan (ed). 2005. *Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara (Catatan Perjalanan dan Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antrara Pemuka Agama Pusat dan Daerah Tahun 2005)*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag. RI.
- Magnis-Suseno, Franz SJ. 2005. "Kerukunan Beragama dalam Keragaman Agama". Dalam *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik, dan Pendidikan*. Alif Theria Wasim, dkk (ed). Yogyakarta: Oasis Publisher.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Mortimer, Edward. 1991. *Christianity and Islam dalam International Affairs (Royal Institute of International Affairs-1994)*, Vol. 67, No. 1 January.
- Muhadjir, Noeng. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad, Afif. 1997. "Kerukunan Beragama pada Era Globalisasi". Tulisan pada Dies natalis IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ke-29, tanggal 9 April. Bandung: t.p.
- Rae, Paul. T.t. "Cristian-Muslim Relation". Dalam *Compass: A Rivew of Topical Theolgy*, Vol. 36 No. 1.
- Reslawati, Minoritas di Tengah Mayoritas: *Interaksi Sosial Katolik dan Islam di Kota Palembang*. <http://www.lipipress.com/komunika-majalah-ilmiah-populer-komunikasi-dalam-pembangunan>
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Alih bahasa oleh Alimandan. Jakarta: Kencana.
- Robert K. 2002. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir Jakarta: Rajawali Pers.
- Tomagola, Tamrin Amal. 2003. *Anatomi Konflik Komunal di Indonesia: Kasus Maluku, Poso, dan Kalimantan (1998-2002)*", dalam Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag RI.